

**MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) DI KOTA SAMARINDA**

Albertus Lingai, Heryono Susilo Utomo

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 4, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Samarinda.

Pengarang : Albertus Lingai

NIM : 2002016007

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 24 September 2024

Pembimbing,



**Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si.
NIP. 19591023 198803 1 010**

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003
Volume : 12	
Nomor : 4	
Tahun : 2024	
Halaman : 1213-1223	

MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA BENJIR OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DI KOTA SAMARINDA

Albertus Lingai ¹, Heryono Susilo Utomo ²

Abstrak

Manajemen bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan agar menekan dampak dari bencana yang terjadi pada suatu wilayah, serta mempercepat proses pemulihan pasca bencana. BPBD Kota Samarinda adalah instansi yang bertanggung jawab untuk mengatasi bencana di Kota Samarinda, salah satunya banjir, namun sampai saat ini BPBD Kota Samarinda masih menemukukan hambatan dalam pelaksanaan tugasnya. Perihal tersebut terlihat dari masih tingginya intensitas banjir dan titik banjir yang tergolong cukup banyak di Samarinda. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Samarinda dan untuk mengetahui faktor penghambat BPBD dalam mengatasi bencana banjir di Kota Samarinda. Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. Sumber data primer penelitian ini adalah kepala badan BPBD Kota Samarinda dan staf ahli Divisi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Divisi Kedaruratan dan Logistik, serta Divisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Samarinda. Analisis data dilaksanakan secara interaktif. Perolehan penelitian memperlihatkan bahwasanya BPBD Kota Samarinda telah menjalankan manajemen bencana banjir pada tahap pra-bencana dan tanggap darurat dengan cukup baik. Namun, pada tahap pasca-bencana masih terdapat beberapa kendala. Beberapa faktor yang menghambat kinerja BPBD antara lain keterbatasan anggaran, jumlah personel yang terbatas, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat.

Kata kunci : *Manajemen Bencana, Penanggulangan Bencana, Banjir*

Pendahuluan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan pengertian menurut Undang-

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: albertuslingai06@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

undang tersebut, menjelaskan bahwa banyak hal atau faktor yang bisa memicu bencana, baik itu pengaruh dari alam sendiri, non alam, bahkan dari manusia itu sendiri. Selain itu dalam Undang-undang ini juga memberikan pemahaman khusus bagi ketiga bencana tersebut yaitu bencana alam, non alam, serta sosial.

Kota Samarinda, merupakan wilayah yang tergolong ke dalam daerah yang memiliki potensi tinggi terkena banjir. Fenomena ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk curah hujan yang melimpah, topografi yang datar, dan perkembangan kota yang tidak teratur. Banjir di Kota Samarinda terjadi hampir setiap tahun, terutama saat musim hujan, dan berpotensi mengakibatkan dampak yang signifikan, baik dalam hal kerugian materiil maupun non-materiil, seperti kerusakan infrastruktur, kehilangan sumber daya ekonomi, dan bahkan hilangnya nyawa.

Agar meminimalisir dampak dari bencana banjir, pemerintah Indonesia sudah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan di setiap daerah, terdapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD Kota Samarinda memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam upaya penanggulangan banjir, seperti merancang rencana penanggulangan bencana, memantau serta memberikan peringatan dini, melakukan evakuasi dan penyelamatan, serta melaksanakan proses pemulihan pasca-bencana. Selain itu, BPBD juga melakukan kerja sama dengan badan atau dinas lain yang relevan, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, dalam mengatasi bencana banjir.

Sesuai tugasnya untuk menangani berbagai macam bencana di daerah, BPBD Kota Samarinda dengan berkoordinasi dengan instansi lain melakukan berbagai macam usaha, seperti meninggikan beberapa ruas jalan yang menjadi tempat langganan titik banjir, pemeliharaan saluran drainase kota, pembenahan sungai-sungai. Hingga saat ini, masih sering terdengar keluhan dari masyarakat terkait banjir dan upaya penanggulangannya. Hal ini karena pada kenyataannya, setiap kali musim hujan tiba, Kota Samarinda hampir selalu dapat dipastikan mengalami banjir, bahkan banjir ini telah menyebabkan hilangnya nyawa masyarakat.

Meskipun BPBD memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana banjir, tetapi sampai saat ini masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas BPBD di Kota Samarinda. Yang menjadi permasalahan utama terkait pelaksanaan tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Samarinda adalah anggaran dana yang dirasa kurang mencukupi, hal ini menyebabkan timbulnya masalah lain seperti kurangnya alat untuk pelaksanaan tugas penanggulangan, pembangunan sarana yang dapat membantu untuk penanganan tugas, serta jumlah personil yang kurang.

Kendala kekurangan anggaran yang dihadapi oleh BPBD Kota Samarinda bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: Prioritas Anggaran kemungkinan besar BPBD harus bersaing dengan banyak unit lain dalam pemerintah kota untuk

mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. Keterbatasan Sumber Daya Kota Samarinda mungkin mengalami keterbatasan dalam sumber daya keuangan, mengakibatkan alokasi yang tidak memadai untuk penanggulangan bencana. Ketergantungan pada dana pusat Jika BPBD bergantung pada dana dari pemerintah pusat atau bantuan internasional, fluktuasi dalam alokasi atau keterlambatan dalam penyaluran dana bisa menjadi masalah. Faktor-faktor Eksternal bencana alam yang sering melanda wilayah tersebut dapat memerlukan alokasi anggaran yang besar secara tidak terduga, sehingga meningkatkan tekanan pada sumber daya yang ada.

Sebagai usaha untuk melaksanakan tugasnya untuk menangani banjir di Kota Samarinda, BPBD membangun alat untuk memberikan peringatan dini ketika permukaan air di beberapa titik yang dianggap rawan banjir mengalami kenaikan, sehingga masyarakat disekitar daerah tersebut dapat mewaspadai jika wilayah disekitarnya berpotensi akan terjadi banjir. Namun karena terkendala anggaran biaya untuk membangun alat tersebut sampai saat ini baru ada 12 alat yang dapat dibangun, sehingga ada beberapa wilayah lagi yang pembangunannya belum bisa dilaksanakan, hal ini membuat proses antisipasi bencana banjir pada saat sebelum terjadinya bencana belum dapat dimaksimumkan sepenuhnya oleh BPBD.

Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi memadai merupakan salah satu hambatan dalam menjalankan tugas BPBD. BPBD memerlukan SDM yang telah terlatih dan memiliki pemahaman yang memadai tentang upaya penanggulangan banjir. Namun, hingga saat ini, banyak petugas BPBD dapat dikatakan kurang mempunyai potensi dan keterampilan yang bisa mendukung mereka melaksanakan tugasnya menghadapi bencana banjir. Akibat kendala yang dialami BPBD dalam melaksanakan tugasnya tersebut, membuat sampai saat ini masih ditemui wilayah atau titik yang mejadi wilayah rawan terjadinya bencana banjir.

Kerangka Dasar Teori

Manajemen Bencana

Definisi dari bencana menurut ISDR (2004) yaitu suatu permasalahan yang sangat serius terhadap fungsi yang dimiliki ataupun aktivitas dari suatu komunitas yang menyebabkan kerugian manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan yang luas dan melebihi kapasitas komunitas yang menjadi korban dalam keadaan ini masyarakat harus juga mampu untuk mengatasi atau paling tidak memperkecil dampak yang ditimbulkan dari bencana itu sendiri.

Manajemen bencana ialah beberapa usaha yang bertujuan untuk mencegah atau mitigasi bencana. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan untuk memperkecil kemungkinan kerugian yang ditimbulkan dari terjadinya suatu bencana, kemudian sebagai usaha untuk mempercepat proses pemulihan dari kondisi setelah

terjadinya bencana. Adiyoso (2018) menjelaskan secara general siklus manajemen bencana melalui 3 klasifikasi bencana yakni sebelum berlangsungnya bencana, ketika berlangsungnya bencana, dan setelah bencana. Selain itu terdapat lima tahapan yakni, pencegahan atau mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Mahardika & Setianingsih (2018) menjelaskan bahwa manajemen bencana adalah langkah-langkah yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis untuk mengelola bencana secara efektif dan aman sehingga dampak yang ditimbulkan juga bisa diperkecil, melalui tiga tahap berikut ini:

1) Tahapan Prabencana (sebelum terjadinya bencana)

Tahap ini dalam manajemen bencana mencakup persiapan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana, termasuk langkah-langkah seperti kesiagaan, peringatan dini, dan upaya mitigasi.

2) Saat Kejadian

Dalam situasi peringatan dini atau bahkan tanpa peringatan, ketika bencana terjadi, langkah tanggap darurat menjadi sangat penting untuk mengatasi dampak bencana secara segera dan efisien, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah korban dan kerugian sebanyak mungkin.

3) Pasca Bencana (setelah terjadinya bencana)

Setelah terjadi bencana dan melewati fase tanggap darurat, langkah berikutnya adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam konteks manajemen bencana, pengaruh buruk sebagai hasil dari bencana bisa diperkecil dengan melaksanakan aktivitas pengurangan risiko total. Aktivitas ini dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seluruh aspek manajemen bencana.

Bencana

Bencana ialah peristiwa atau beberapa peristiwa yang terjadi di suatu daerah sehingga mengakibatkan kerugian, merusak infrastruktur umum, tempat pelayanan penting dimasyarakat, bahkan dapat menimbulkan korban dari orang-orang yang terdampak, peristiwa ini terjadi suatu faktor yang berada di ambang batas normal yang terlampaui

Fatimah & Nuryaningsih (2019) menyebutkan bahwa bencana termasuk sesuatu yang lumrah kita ketahui bahkan pernah kita alami. Indonesia sebagai negara dengan gugusan kepulauan sangat berpotensi mengalami bencana dengan berbagai jenis.

Banjir

Banjir dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi peristiwa yang dapat mengganggu kehidupan manusia yaitu munculnya beberapa genangan air dari yang terkecil ataupun besar yang karena aktivitas yang dilakukan oleh manusia maupun alam atau aliran air yang tinggi, dan tidak tertampung oleh aliran sungai yang menyebabkan air tersebut mengalir ke daerah yang rendah (Sulaiman, et al., 2020).

Menurut Arisanty dalam Rahmaniah (2021) banjir dapat disebabkan oleh luapan air di suatu lokasi secara berlebihan karena curah yang tinggi, kerusakan tanggul maupun disebabkan oleh peningkatan permukaan air laut

Definisi Konsepsional

Manajemen bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan agar menekan dampak buruk dari suatu bencana, serta untuk mempercepat proses pemulihan pasca terjadinya suatu bencana. Manajemen bencana pada umumnya meliputi tiga tahapan, yakni pra bencana, saat terjadinya bencana, dan pasca terjadinya bencana.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, berfokus pada peran BPBD Kota Samarinda dalam mengatasi bencana banjir. Mengkaji fungsi manajemen bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Samarinda dalam mengatasi bencana banjir yang sering terjadi di wilayah tersebut. Penelitian ini dilakukan di BPBD Kota Samarinda dengan informan yang terdiri dari staf BPBD serta masyarakat Kota Samarinda, sementara *key informan* adalah staf ahli divisi satu BPBD Kota Samarinda. Data sekunder diperoleh melalui arsip-arsip, dokumen, dan sumber internet.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses Manajemen Bencana oleh BPBD Kota Samarinda

Manajemen bencana yang dilaksanakan BPBD Kota Samarinda sudah bisa dikatakan baik, karena sudah melaksanakan sebagian proses manajemen bencana dengan baik sesuai dengan indikator teori yang digunakan pada penelitian ini, dimana ada 3 (tiga) indikator yang dipergunakan sebagai fokus dalam menentukan keberhasilan manajemen bencana. Indikator yang digunakan menyesuaikan dengan teori manajemen bencana (Adiyoso, 2018). Adapun indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Pra Bencana

Dalam fase pra bencana ini mencakup kegiatan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini.

a) Pencegahan (*Prevention*)

Upaya yang dilaksanakan agar mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya (Anies, 2018). Contoh kegiatan pencegahan yang

dapat dilaksanakan yakni dengan melarang pembakaran hutan dalam perladangan, melarang penambangan batu di daerah curam, melarang membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya.

Sebagai bentuk upaya pencegahan, BPBD Kota Samarinda rutin melakukan kerja bakti bersama warga di beberapa titik rawan banjir, bentuk kerja bakti yaitu pembersihan parit atau saluran pembuangan air, agar jika terjadi hujan debit air lebih cepat untuk dibuang kesungai sehingga tinggi banjir lebih cepat turun di daerah tersebut.

b) Mitigasi Bencana (*Mitigation*)

Mitigasi ialah rangkaian upaya yang dilaksanakan agar meminimalisir risiko bencana yang dilaksanakan secara fisik, meupun kesadaran, hingga meningkatkann kemampuan menghadapi bencana (Joko, 2011). Kegiatan mitigasi ini dilaksanakan dengan melaksanakan penataan ruangan; pengaturan pembangunan; pembangunan infrastruktur; tata bangunan; dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Dalam hal mitigasi, BPBD Kota samarinda melaksanakan program kelurahan tangguh bencana, dalam program ini beberapa daerah yang dianggap rawan terjadinya bencana diberi edukasi dan pembinaan tentang bagaimana tindakan yang tepat untuk dilakukan dalam menghadapi suatu bencana, ini bertujuan agar masyarakat sekitar saat terjadi bencana dapat mengambil tindakan yang benar dalam menghadapi bencana, dengan tujuan agar dampak buruk yang ditimbulkan bisa diperkecil.

Selain program kelurahan tangguh bencana, BPBD Kota Samarinda juga telah membangun alat peringatan dini di beberapa titik rawan banjir, serta membuat jalur evakuasi yang tepat agar dapat memudahkan saat proses evakuasi korban.

c) Kesiapsiagaan (*Preparedness*)

Pengertian kesiapsiagaan menurut UU No. 24 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Dalam hal pengorganisasian BPBD Kota Samarinda telah dibagi mejadi beberapa divisi, dengan tugasnya masing-masing. Divisi 1 bertugas dalam pencegahan dan edukasi kepada masyarakat, divisi 2 bertugas saat terjadinya bencana, namun jika bencana yang terjadi cukup besar semua divisi akan dilibatkan beserta beberapa instansi lain seperti Basarnas dan sukarelawan, serta divisi 3 bertugas untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga pemulihan pasca bencana bisa lebih cepat.

d) Peringatan Dini (*Early Warning*)

Peringatan Dini ialah rangkaian kegiatan memberi peringatan secepat mungkin pada masyarakat terkait potensi terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang atau upaya memperingatkan bahwasanya bencana mungkin akan segera terjadi (UU 24/2007 Pasal 1 ayat 8). Pemberian peringatan

dini ini harus menjangkau masyarakat *accessible*, segera *immediate*, tegas tidak membingungkan *coherent*, bersifat resmi *official*.

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa pada tahap pra bencana memiliki banyak program guna meminimalisir dampak negatif dari banjir, salah satunya dengan membuat *Early Warning System* (EWS), di beberapa daerah, dengan adanya alat peringatan dini ini, maka masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dapat mengetahui lebih awal, akan terjadinya banjir, sehingga masyarakat dapat mengevakuasi diri ke titik yang lebih aman, lewat jalur evakuasi yang sudah dirancang sebelumnya.

Selain EWS juga ada program kelurahan tangguh bencana, yang saat ini berada di 12 titik rawan banjir, di sini masyarakat akan diedukasi dan dilatih bagaimana cara atau metode yang tepat dalam menghadapi bencana, salah satunya banjir, dengan harapan masyarakat dapat mempersiapkan diri terhadap bencana yang mungkin saja terjadi di wilayah mereka.

Dari beberapa program yang dijelaskan menunjukkan bahwa BPBD Kota Samarinda sudah menjalankan tugasnya dengan baik di tahap pra bencana, walaupun kenyataan dilapangan masyarakat yang tinggal di beberapa daerah rawan banjir sudah diedukasi, namun belum mematuhi anjuran yang diberikan oleh pihak BPBD.

2. Saat Tanggap Darurat

Dalam tahap ini mencakup dua fase atau tahapan yaitu, tanggap darurat dan bantuan darurat.

a) Tanggap Darurat (*Response*)

Tanggap darurat ialah kegiatan yang dilaksanakan secara cepat ketika berlangsungnya bencana untuk menangani dampak buruk dari bencana tersebut (Soehatman, 2011). Tindakan ini dapat dilaksanakan dengan menyelamatkan dan mengevakuasi korban, harta benda, memnuhi kebutuhan dasar, melindungi, mengurus pengungsian, serta memulihkan sarana dan prasarana.

Pada tahap tanggap darurat BPBD juga melakukan berbagai macam usaha guna memperkecil dampak banjir yang terjadi di Kota Samarinda. Pada saat banjir terjadi biasanya BPBD akan melakukan pengecekan lapangan guna menentukan langkah apa yang perlu di lakukan, jika banjir yang terjadi kecil maka BPBD tidak akan melakukan tindakan yang signifikan, namun jika banjir yang terjadi cukup besar dan masuk ke status siaga, maka tindakan evakuasi perlu dilakukan. Dalam hal ini BPBD tidak sendiri, akan ada instansi lain yang ikut membantu melakukan evakuasi seperti Basarnas, pihak keamanan, dan relawan. Hal ini disebabkan BPBD memiliki keterbatasan jumlah personil, jika banjir terjadi di beberapa titik sekaligus, dan terjadi bersamaan dengan bencana lain misalnya longsor.

Adapun setelah evakuasi tindakan yang kemudian akan dilakukan adalah memindahkan masyarakat korban bencana ke titik yang lebih aman, disini BPBD

juga melakukan kerja sama dengan beberapa instansi lain seperti dinas sosial untuk menyediakan tenda pengungsian dan dapur umum, hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan pokok para pengungsi.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa BPBD Kota Samarinda juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik pada tahap tanggap darurat bencana banjir, lewat respon cepat serta langkah-langkah yang diambil untuk mengevakuasi korban bencana banjir.

3. Pasca Bencana

Pada tahap terakhir dalam fase manajemen bencana, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi, BPBD Kota Samarinda melaksanakan berbagai upaya pemulihan pasca bencana. Rehabilitasi, sebagaimana dijelaskan oleh Giri (2017), adalah upaya memperbaiki serta memulihkan semua aspek pelayanan publik hingga mencapai kondisi yang memadai di wilayah pasca bencana. Tujuan utamanya yakni memastikan normalisasi dan berjalannya kembali aspek pemerintahan serta kehidupan masyarakat dengan baik.

Rekonstruksi, di sisi lain, melibatkan perumusan kebijakan dan langkah-langkah nyata yang terencana secara baik, konsisten, dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen infrastruktur, sarana, serta sistem kelembagaan. Langkah ini mencakup program rekonstruksi fisik dan nonfisik, dengan tujuan memulihkan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, serta menegakkan hukum dan ketertiban di wilayah pasca bencana (Giri, 2017). Rekonstruksi juga berfokus pada kebangkitan peran serta partisipasi masyarakat sipil dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam rangka pemulihan pasca banjir, BPBD Kota Samarinda melakukan pendataan untuk mencatat dampak serta kerusakan yang terjadi akibat bencana. Hasil pendataan ini digunakan sebagai dasar penganggaran dan pengusulan perbaikan terhadap fasilitas umum maupun rumah warga yang rusak. Meskipun BPBD sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik dalam pemulihan pasca bencana, masih diperlukan optimalisasi pemulihan di bidang lain yang terdampak, seperti ekonomi masyarakat dan dampak sosial yang diakibatkan oleh bencana.

Faktor Penghambat BPBD Kota Samarinda dalam Melaksanakan Tugasnya

Dalam pelaksanaan tugas serta fungsinya sebagai badan yang bertanggung jawab dalam hal penanganan bencana yang terjadi di Kota Samarinda BPBD mengalami beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan fungsinya tersebut, adapun beberapa faktor tersebut sebagai berikut:

a) Anggaran

Anggaran menjadi permasalahan pokok bagi BPBD dalam melaksanakan tugasnya, sebab saat ini BPBD memiliki keterbatasan anggaran, sebab jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah hanya berfokus pada proses penanggulangan bencana yang mungkin terjadi, hal ini mengakibatkan program-program yang dimiliki oleh BPBD tidak berjalan maksimal sebab anggaran yang

diterima harus dibagi kedalam proses penanggulangan serta program yang dimiliki oleh BPBD.

b) Jumlah Personel Yang Terbatas

Kendala selanjutnya yang dihadapi oleh BPBD adalah keterbatasan jumlah personel, kendala ini terkhusus dialami oleh divisi 2 dari BPBD Kota Samarinda, dimana divisi inilah yang bertugas dalam melakukan evakuasi korban bencana jika keadaan menuntut dilakukannya kegiatan tersebut, ini menjadi kendala jika terjadi bencana yang berskala sedang sampai besar secara bersamaan, sehingga personil dari divisi 2 ini perlu dibagi menjadi beberapa kelompok

Divisi 2 saat ini beranggotakan 32 orang personel mulai dari kepala, staf-staf, dan sampai anggota lainnya. Sedangkan divisi 2 membutuhkan penambahan anggota 5 sampai dengan 10 orang lagi, sehingga penanganan bencana bisa lebih dimaksimalkan.

c) Masyarakat

Dari segi masyarakat yang menjadi hambatan partisipasi dan psikologis dari masyarakat itu sendiri. Untuk partisipasi masyarakat yang menjadi masalah adalah kepekaan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan seperti menjaga kebersihan aliran air dan sungai. Kemudian dari segi psikologis masyarakat adalah, masyarakat tidak mau mengikuti himbuan yang telah diberikan oleh BPBD, misalnya masyarakat yang tetap bermukim diwilayah pinggir sungai, ini membuat penyempitan sungai serta juga membuat sungai lebih kotor oleh sampah rumah tangga, yang membuat debit air tidak dapat ditampung sungai, sehingga potensi banjir didaerah tersebut semakin tinggi.

Penutup

Kesimpulan

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Samarinda sudah cukup baik dalam tahap pra bencana dan saat terjadinya bencana, namun pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi perlu untuk dimaksimalkan lagi. Hal ini bisa dinilai dari peranan kepala pelaksana BPBD Kota Samarinda yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen bencana dengan baik, penanggulangan bencana dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan. Adanya kondisi yang baik dengan instansi atau dinas terkait sebagai upaya penanggulangan bencana yang didasarkan pada kerja sama yang dijalankan dengan baik dan saling mendukung serta dalam penanggulangan bencana melibatkan berbagai pihak sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Pada tahapan prabencana sudah berjalan dengan baik, dengan telah dibangunnya alat peringatan dini untuk bencana banjir, sosialisasi bagi masyarakat, serta pemberian pengajaran bagi pelajar dan mahasiswa dalam

penanganan bencana banjir, dan sudah adanya pembangunan jalur evakuasi dan tempat pengungsian yang dibangun di daerah-daerah rawan banjir,

Pada tahapan tanggap darurat sudah berlangsung dengan baik, melalui penyaluran bantuan logistik, melaksanakan proses penyelamatan atau evakuasi bagi korban banjir, dan perlindungan terhadap kelompok rentan yang diprioritaskan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan maupun Puskesmas daerah setempat.

Pada tahapan pasca bencana yang masih belum terlaksana dengan sepenuhnya. Adapun hal yang belum terlaksana sepenuhnya yakni pembangunan fasilitas penanggulangan banjir yang masih dalam proses pembangunan, serta belum adanya perhatian dari pihak BPBD Kota Samarinda terkait dampak lain dari banjir dalam aspek social, Kesehatan, dan psikologis dari korban bencana.

Adapun faktor penghambat bagi BPBD Kota Samarinda dalam melaksanakan manajemen bencana banjir di Samarinda yaitu; (1) Jumlah sumber daya manusia yang terbatas; (2) Masyarakat; (3) Anggaran. Faktor penghambat tersebut harus dapat segera dapat diatasi agar manajemen bencana banjir menjadi lebih efektif karena pada dasarnya manajemen bencana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana. Bencana memang tidak mungkin untuk dihindari, akan tetapi bencana dapat dicegah dan dikurangi risikonya

Saran

Adapun yang menjadi saran dari hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Samarinda, terkait dengan manajemen penanganan bencana banjir, adalah sebagai berikut:

1. Pada masalah anggaran BPBD Kota Samarinda, sebaiknya membuat penganggaran khusus untuk setiap bencana, terutama bencana banjir, hal ini dimaksudkan dengan adanya anggaran khusus sehingga penanganan bencana banjir bisa lebih maksimal.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda sebaiknya senantiasa meningkatkan kemampuan dari SDM, kapasitas organisasi, ketersediaan sarana prasarana, dan kolaborasi. Masyarakat di sekitar lokasi bencana juga harus dilindungi agar meminimalisir korban jiwa dan kerugian materi.
3. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus dapat bekerja sama dalam melaksanakan manajemen bencana banjir karena manajemen bencana bukan hanya pemerintah yang harus bertindak akan tetapi seluruh pihak juga harus terlibat sesuai dengan logo dari BNPB yakni segitiga biru yang artinya sinergi antara 3 pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam manajemen bencana

Daftar pustaka

Adiyoso, Wignyo. 2018. *Manajemen Bencana Pengantar & Isu-Isu Strategis*. Jakarta: Bumi Aksara

- Anies. (2018). *Manajemen Bencana Solusi Untuk Mencegah dan Mengelola Bencana*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Chirstanto, Joko. (2011). *Gempa Bumi, Kerusakan Lingkungan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Dermawan, Imam. (2020). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Menanggulangi Abrasi Air Laut di Gampong Kedai Palak Kerambil Kecamatan Susoh*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Diunduh dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15520>
- Giri, Wiarto. (2015). *Mengenai Fungsi Tubuh Manusia*. Surakarta: Gosyen Publishing.
- Mahardika & Setianigsih (2018). Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Kota Semarang City. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 2. Diunduh dari <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3472>
- Mulyanto, Parikesit Nurus Ario, & Utomo, Hariyono. (2012). *Petunjuk Tindakan dan Sistem Mitigasi Banjir Bandang Semarang*. Direktorat Sungai Dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008. tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Rahmaniah. (2021). *Analiss Penyebab Bencana Alam Banjir yang Ada di Wilayah Indonesia*. Skripsi. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Diunduh dari <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/gmpn4>.
- Soehatman, Ramli. (2011). *Manajemen Bencana*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sulaiman, dkk. (2020). Analisis Penyebab Banjir di Kota Samarinda. *Jurnal Geografi Gea*, 20(1). Diunduh dari <https://doi.org/10.17509/gea.v20i1.22021>.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.